

PROGRAM DESA BERDERING DI “DESA KARAMPUANG” KABUPATEN MAMUJU

DESA BERDERING’S PROGRAM IN “KARAMPUANG VILLAGE” MAMUJU DISTRICT

Bambang Riawan Eko

Peneliti Komunikasi dan Media

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Surabaya

Jl.Raya Ketajen No: 35 Tlp 031- 8011944 Sidoarjo-Jawa Timur

e-mail : briawaneko@yahoo.co.id

(naskah diterima tgl 15 Oktober 2012, dan disetujui terbit tgl 23 Nopember 2012)

Abstract

This reseach seeks to answer the emering issue of what are factor led to the failure of Program Desa Berdering at Karampuang Village, Mamuju District. This evaluative study attempts to describe the contributing factors of the failure of the program at the village. According, there are 3 sources in this study, i.e. Head of Karampuang village, villagers whose land are occupied by public telephone infrastructure as well as the Hhead of Communication and Technology Office of Departement of Transportation, Communi-cation and Information Technology Office of Mamuju Regency. It can be concluded from the results that there are lack of coordination among Rural Telecommunications and Information Technology Center, local government and managing partners led to the emergence of problems. The low participation of Karampyang village toward this project was due to the fact that the public expectation did not conform with the provision of the government, therefore the people werw being apathetic in addressing the issue. In addition, the technology provided by the govern-ment are not as good as the current one used by Karampuang villagers.

Keywords: Program Desa Berdering, Media Theory

Abstraksi

Penelitian ini berupaya mencari jawaban terhadap permasalahan yang muncul, yakni faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan program desa berdering di Desa karampuang, Kecamatan Mamuju. Penelitian bersifat evaluatif, berupaya menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan program yang dilaksanakan di desa ini gagal. Terkait dengan itu, narasumber dalam penelitian ini ada tiga (3) orang, yakni: Kepala Desa karampuang, penduduk desa yang lahannya ditempati infrastruktur telepon umum serta Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten

Mamuju. Dari temuan dilapangan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kordinasi antara Balai telekomuni-kasi dan Informatika Pedesaan dengan pemerintah daerah serta rekanan pelaksana menyebabkan munculnya kendala di lapangan. Rendahnya partisipasi penduduk Desa karampuang terhadap proyek ini disebabkan karena apa yang diinginkan oleh penduduk desa tidak sesuai dengan pemberian pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penduduk desa bersikap apatis. Selain itu teknologi yang diterapkan oleh teknologi itu tidak sebaik teknologi yang dimanfaatkan penduduk Desa karampuang saat ini.

Kata kunci: Program Desa berdering, Teori Media

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian ini berawal dari tugas kedinasan untuk pengumpulan data “Penelitian Pemanfaatan Program USO di Masyarakat di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi barat”. Sesuai dengan konsep penelitian tersebut, salah satu syarat desa yang dijadikan sampel penelitian adalah desa yang mendapat bantuan program USO (Universal Service Obligation) dari pemerintah pusat berupa, yakni “Program Desa Berdering, Program Desa Pinter atau Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Sedangkan obyek penelitian yang ditulis dalam artikel ini khusus difokuskan di Desa Karampuang Kabupaten Mamuju. Berdasar data yang ada di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju, tahun 2010 terdapat 18 desa yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat berupa Program Desa berdering. Kecamatan Mamuju mendapat jatah satu desa, yakni Desa Karampuang.

Desa Karampuang tahun 2010 pernah didatangi oleh beberapa orang yang bertugas untuk memasang telepon umum di desa tersebut. Kenyataan pada saat dilakukan pengumpulan data lapangan, pada tanggal

28 Mei sampai dengan 2 Juni 2012, sekitar satu setengah tahun, perangkat telepon yang dijanjikan belum dikirim ke yang bersangkutan, sehingga Program Desa Berdering yang diberikan dapat dikatakan gagal. Mengetahui hal tersebut, maka muncullah ide penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut secara khusus. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah, faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan “Program Desa Berdering di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju”. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan dari “Program Desa Berdering di Desa Karampuang” serta mencari solusi pemecahan dari kegagalan program tersebut.

Kerangka pemikiran

Hipotesa awal yang diturunkan dalam penelitian ini, ada dua faktor penyebab kegagalan, yakni: (1) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan (2) Rendahnya partisipasi masyarakat desa terhadap program bantuan USO. Lemahnya koordinasi ditandai tidak adanya komunikasi antar Lembaga baik di pusat maupun daerah secara formal. Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang dalam pelaksanaan dikerjakan Balai Penyedia dan pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI), dipercayakan kepada pihak ketiga yakni rekanan yang melaksanakan proyek USO. Tetapi mereka tidak melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat, sehingga partisipasi masyarakat desa sebagai penerima bantuan kurang apresiatif. Rendahnya partisipasi masyarakat desa terjadi karena tidak ketemu kebutuhan masyarakat desa dengan instansi yang memberi bantuan. J.P. Chaplin dalam bukunya Kamus Lengkap Psikologi (Chaplin, 2006:5) menjelaskan yang dimaksud dengan *need* (kebutuhan, keperluan) adalah sebarang kekurangan, ketiadaan atau ketidak mampuan yang dirasakan seseorang sehingga merusak kesejahteraannya. Guna memperjelas perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Desa Karampuang secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Mamuju yang terdiri dari empat Kelurahan dan empat desa. Empat kelurahan dan tiga desa berada disepanjang pantai Selat Makasar, sedang Desa Karampuang terletak di sebuah pulau di Selat Makasar dengan jarak sekitar tujuh mil dari Kota Mamuju.

Sebagai ibukota kabupaten dan ibukota provinsi, sudah selayaknya apabila wilayah Kecamatan Mamuju mendapat aliran listrik dari PLN. Tetapi fasilitas listrik tersebut hingga penelitian ini dilaksanakan masih belum dapat dinikmati penduduk Desa Karampuang. Maka tidak salah jika seluruh penduduk desa membutuhkan adanya Program Listrik Masuk

Desa seperti halnya desa desa yang ada di daratan lain, bukan internet. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika berpendapat karena letak Desa Karampuang terpisah dengan desa dan kelurahan lain, maka guna memperlancar arus komunikasi, Desa Karampuang membutuhkan sarana komunikasi sehingga desa tersebut perlu mendapat bantuan Program Desa Berdering untuk tahun 2010.

Alasan pemberian bantuan tersebut juga tidak salah, karena sesuai dengan tugas yang diemban kementerian yakni Menuju Masyarakat Informasi Indonesia, maka kementerian berupaya agar semua desa se-Indonesia tidak mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Hanya saja tampak kurang cermat ketika melakukan persiapan dan analisis penempatannya, tanpa koordinasi (informan, 2012). Perbedaan antara kebutuhan masyarakat (Program Listrik Masuk Desa) dengan bantuan dari pemerintah (Program Desa Berdering) ini mempengaruhi partisipasi masyarakat desa. Semakin dekat antara kebutuhan dan bantuan, maka partisipasi masyarakat desa semakin tinggi. Begitu sebaliknya semakin jauh perbedaan antara kebutuhan dan bantuan yang diterima, maka semakin rendah pula partisipasi masyarakat desa. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara kebutuhan dan bantuan mempunyai hubungan signifikan dengan partisipasi masyarakat desa.

Menurut Santoso, (2005) partisipasi masyarakat secara sadar, kritis, sukarela, murni, dan bertanggung jawab memang baik. Tetapi justru yang baik itulah yang tidak mudah dilaksanakan, karena persyaratan-persyaratan untuk melaksanakan dan mencapainya berat dan sulit. Batasan antara partisipasi murni masyarakat dan partisipasi semu memang batasannya sangat tipis. Maka dibutuhkan kejelian dalam menilai partisipasi masyarakat, apakah masuk partisipasi murni atau partisipasi semu. Terkait dengan kehadiran telepon (Program Desa Berdering) tidak terlepas dengan Teori Media. Menurut Marshall McLuhan dalam (Stephen W. Littlejohn; 2008) menyatakan bahwa manusia beradaptasi terhadap lingkungan melalui keseimbangan atau rasio pemahaman tertentu, dan media utama dari masa tersebut menghadirkan rasio pemahaman tertentu yang mempengaruhi persepsi. McLuhan memandang setiap media sebagai sebuah perpanjangan pikiran manusia.

Pada tahun 1990, Mark Poster meluncurkan buku dengan “The Second media Age, (Stephen W. Littlejohn; 2008) yang menandai periode baru dimana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. Inilah yang sering disebut dengan Teori Media Baru, untuk membedakan dengan Teori Media Klasik dari

Mc Luhan. Perbedaan antara Teori Media Klasik dengan Teori Media baru terletak pada “penekanan”. Teori Media Klasik menekankan pada “penyiaran”, sedang Teori Media Baru titik tekannya pada “jaringan”. Penelitian terkait tentang Program Desa berdering menurut pengamatan penulis belum banyak yang dipublikasikan sehingga sulit untuk mencari bahan rujukan. Namun pemberitaan yang mengetengahkan keberhasilan serta kegagalan dari program ini banyak dimuat, seperti tentang keberhasilan yang dimuat di http://ictfiles.com/new/news/FYI/2012/05/24/menkominfo_desa_berdering_jangkau_32800_desa yang diunduh pada tanggal 18 September 2012:

“Program desa berdering sudah selesai di 32.800 desa dan saat ini sudah dinikmati masyarakat terutama dalam pengembangan teknologi informasi,” kata Menkominfo, Tifatul Sembiring di sela pembukaan Pekan Informasi Nasional (PIN) di Manado, Pelaksanaan program desa berdering tersebut bekerja sama dengan operator termasuk operator selular yang ada diseluruh Indonesia”.

Memang banyak pemberitaan terkait dengan peresmian Pekan Informasi Nasional (PIN) yang diselenggarakan di Manado. Disisi lain, banyak pemberitaan dari berbagai daerah tentang kegagalan dari program ini, dimana semua data tersebut di unduh pada tanggal 18 September 2012.

<http://www.haluankepri.com/news/anambas/19245-program-desa-berdering-belum-berfungsi.html>, dengan judul:Program Desa Berdering Belum Berfungsi yang ditulis tanggal 18 Oktober 2011.

<http://www.jurnas.com/halaman/9/2012-02-10/198596>, dengan judul: Desa Berdering Dinilai Menipu Publik yang ditulis tanggal 10 Feb 2012

<http://koranbogor.com/2012/04/20/perangkat-desa-berdering-di-kabupaten-sorong-tak-bisa-berfungsi/>, dengan judul:Perangkat “Program Desa Berdering” di Kabupaten Sorong Tak Bisa Berfungsi http://www.kaltengpos.web.id/?menu=detail_atas&idm=9685, dengan judul: Telepon Desa Rusak Total ditulis tanggal 05 Juni 2012 11:58:34 WIB

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat evaluasi, yakni mengkaji efektivitas atau keberhasilan suatu program. (Kriyantoro; 2006) Lebih jauh dijelaskan bahwa penelitian evaluatif dapat dibedakan menjadi dua, yakni evaluasi sumatif adalah penelitian yang dilakukan setelah program berakhir dan evaluasi formatif apabila penelitian dilakukan bersamaan dengan program yang sedang berjalan. Terkait dengan penelitian

ini, maka penelitian evaluasi sumatif karena program dianggap sudah selesai. Penelitian kualitatif ini mengambil narasumber/informan sebanyak tiga (3) orang yang terkait dengan pelaksanaan program ini, yakni: Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju, Kepala Desa Karampuang dan seorang perangkat desa (Kasi Pembangunan Desa Karampuang), dimana halaman rumahnya dipasang perangkat telepon umum. Seding pihak pelaksana, dalam hal ini ICON+ (PT. Indonesia Comnets Plus) tidak dilibatkan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada tiga (3) narasumber/informan dengan focus tertentu, yakni mengapa koordinasi dengan pemerintah daerah rendah, dan partisipasi masyarakat desa kurang mendukung terhadap program USO di desa yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Mata pencaharian penduduk Desa Karampuang hampir 80 % hidup dari budidaya laut, baik itu sebagai nelayan dan petani rumput laut (Mamuju Dalam Angka, 2011). Secara umum, kehidupan penduduk Desa lingkungan karampuang miskin. Untuk menambah penghasilan keluarga, banyak ibu rumah tangga yang bekerja di lain desa sebagai pembantu atau tukang cuci. Pagi hari penduduk Desa berbondong-bondong pergi meninggalkan pulau, baik untuk bekerja atau berbelanja ke pasar. Para pembantu dan tukang cuci yang berasal dari Desa karampuang biasanya tidak menetap, siang atau sore hari sudah kembali ke desa. Jarak antara Pulau Karampuang dengan Kota mamuju adalah tujuh mil dan untuk menuju ke pulau tersebut transportasi yang ada adalah perahu bermotor. Jarak tujuh mil tersebut ditempuh selama 20 menit pada cuaca baik dan 30 menit apabila ombak atau angin besar. Setiap pagi mereka sudah berkumpul di dermaga Karampuang. Dermaga di Pulau karampuang berada di depan Kantor Desa Karampuang, sehingga tidak kesulitan mencari kantor desa setelah turun dari perahu.

Kepala Desa : wawancara dimulai dengan Kepala Desa Karampuang di kantor desa yang bersangkutan. Ketika ditanyakan apakah di desa ini belum pernah mendapatkan bantuan program desa bordering? Ia menjelaskan bahwa di desa tersebut belum mendapat Program Desa Berdering.

“Memang dulu, sekitar tahun 2010 ada orang yang datang kesini sekitar 3–5 orang (saya lupa) dan mereka mengatakan bahwa desa sini mendapat bantuan telepon umum dari pemerintah. Untuk itu mereka minta kepada kita enaknya telepon umum

ditempatkan dimana. Setelah semuanya terpasang, ternyata pesawat telepon rusak, tidak dapat digunakan. Petugas kemudian memberi tahu kalau pesawat telepon rusak, akan diperbaiki dan membutuhkan waktu sekitar seminggu. Kenyataannya sampai sekarang petugas tersebut tidak datang kesini lagi”.

Saat ditanya, apakah tahu adanya bantuan program tersebut? Kepala desa yang bernama Supriadi menjawab bahwa:

“Saya tidak pernah minta bantuan terkait dengan pengadaan telepon umum”. Setiap rumah tangga disini minimal mempunyai satu telepon seluler. Bahkan kalau keluarga berada, hampir setiap anggota keluarga memiliki telepon seluler. Provider yang beroperasi disini adalah Telkomsel. Kalau pemerintah memberi bantuan berupa Program Desa berdering, sebenarnya menurut saya kurang tepat, sebab meskipun desa kami terpicil dalam artian tidak menjadi satu dengan desa atau kelurahan lain dalam Kecamatan Mamuju, tetapi untuk sarana telekomunikasi desa kami tidak mengalami kendala. Satu keinginan kami adalah adanya bantuan Program Listrik Masuk Desa, seperti desa desa lain yang mendapat bantuan program tersebut”.

Terkait dengan kordinasi antara pemerintah daerah (camat atau kabupaten) dengan kepala desa serta pihak rekanan yang mengerjakan proyek tersebut dijelaskan oleh kepala desa bahwa tidak ada kordinasi. Kepala desa mengatakan:

“Terkait dengan Progam Desa berdering, kami tidak ada kordinasi baik itu dengan pihak kabupaten Mamuju ataupun dengan pihak Kecamatan Mamuju, apalagi dengan pihak rekanan. Tahu-tahu pihak rekanan yakni I CON+ datang dan menyodorkan surat kepada kami dan menyatakan kalau di desa ini akan dipasang telepon umum. Untuk itu kami diminta bantuan untuk menyediakan lahan yang dianggap strategis, agar dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh penduduk di pulau ini.

Pada waktu ditanyakan upaya apa yang dilakukan selaku Kepala Desa Karampuang terkait dengan tidak diselesaikannya proyek tersebut, jawaban kepala desa cukup menarik perhatian peneliti :

“Ya biar saja, kami sebenarnya tidak butuh telepon umum, sebab selama ini kami tidak mengalami kendala pada bidang komunikasi. Hal ini disebabkan jaringan telepon seluler Telkomsel sudah

menjangkau di desa kami. Yang menjadi kendala mungkin pada saat berbicara tiba tiba pembicaraan terputus bukan karena sinyal jelek, tetapi karena baterai hp habis dan kita tidak dapat mengisi (di charger) baterai hp tersebut pada siang hari karena tidak ada aliran listrik.

Dalam buku Kecamatan Mamuju Dalam Angka 2011, terdapat dua desa yang tidak dialiri jaringan listrik dari PLN, yakni Desa Karampuang dan Desa Batupannu. Desa Karampuang berada di satu pulau dengan jarak tujuh Km jauhnya dari kota kecamatan, sedang Desa Batupannu merupakan desa berada di area perbukitan dengan jarak sekitar 12 Km. Dengan demikian, kedua desa ini mengandalkan listrik dari non PLN. Jumlahnya untuk Desa karampuang sebanyak 416 rumah tangga dan untuk Desa Batupannu sebanyak 61 rumah tangga. (BPS Kecamatan Mamuju Dalam Angka 2011). Kalau dihitung, jumlah kepala keluarga sebanyak 739 KK sedang jumlah rumah tangga yang memanfaatkan listrik non PLN sebanyak 416 rumah tangga, artinya 62,4 % rumah penduduk Desa karampuang memanfaatkan listrik sedang sisanya sebanyak 37,6 % menggunakan penerangan dari minyak tanah (Mamuju Dalam Angka,2011).

Jumlah penduduk di Desa Karampuang sebanyak 2.937 jiwa, sekitar 75% diantaranya memiliki hp untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pentingnya hp ini bagi kehidupan penduduk Karampuang ini dibuktikan setiap rumah tangga memiliki minimal satu hp. Kalau dihitung secara kasar, 75% dari 2937 jiwa, maka jumlah orang yang memiliki hp sebanyak 2203 orang, dan apabila umlah tersebut dibagi rata dengan jumlah KK, maka diperoleh data setiap rumah tangga memiliki 2,98 hp (Mamuju Dalam Angka,2011).

Kasmah : adalah perempuan berusia 38 tahun ini menceritakan pengalaman dan pengetahuan mereka ketika berdiskusi dengan peneliti sebagai berikut :

Pada akhir tahun 2010, bapak kepala desa memanggil saya dan menyampaikan maksudnya untuk memasang peralatan telepon umum di halaman rumah saya. Pemilihan rumah saya selain berada di depan dermaga juga karena perangkat tersebut perlu mendapat pengawasan.

Kasmah mengatakan bahwa ada perangkat yang dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, perangkat tersebut adalah elemen listrik tenaga surya. Karena perangkat telepon tidak dapat digunakan, dan karena tiang elemen listrik tenaga surya berada di pekarangan rumahnya, maka seijin bapak kepala desa, maka dimanfaatkanlah listrik tenaga surya itu untuk kebutuhan

rumah tangganya. Dengan demikian, hanya rumah Kasmah saja yang tetap ada pasokan listrik pada siang hari dan malam hari. Ditanya mengapa penduduk atau perangkat desa tidak menanyakan kepada aparat di atasnya, Kasmah menjawab : “ Tidak tahu”. Menurutnyalah kepala desa tidak menanyakan, masyarakat sebenarnya tidak menuntut, sebab mereka (masyarakat) sudah memiliki hp, sehingga keberadaan telepon umum tidak begitu diharapkan.

Kepala Bidang Kominfo Kabupaten Mamuju:
Bapak Mega, sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju mengatakan :

“Saya sempat marah kepada petugas, karena kami merasa tidak mengajukan nama desa-desa yang mendapat bantuan pemasangan telepon umum, tahu-tahu kami diberi nama desa yang menerima. Mereka tidak pernah berkordinasi dengan kami sebagai dinas yang diberi wewenang oleh bupati berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Hal ini dibuktikan kami tidak mendapat surat atau tembusan dari Bapak Bupati Mamuju sebagai penguasa di daerah. Lucunya, ada dua desa yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju Utara dimasukkan ke Kabupaten Mamuju.

Kami juga merasa tersinggung karena secara resmi pihak pelaksana tidak menulis surat kepada kami sebagai aparat pemerintah. Kami hanya mendapat foto copy-an surat yang ditujukan kepada camat dan lurah di wilayah Indonesia Bagian Timur, jadi surat itu tidak khusus pada camat atau lurah masing-masing, tetapi secara umum kepada camat atau lurah/ kepala desa yang desanya mendapat bantuan Program Desa Berdering. Sehingga kami merasa dilangkahi. Untuk itu saya jelaskan kepada petugas yang datang menghadap saya waktu itu bahwa dinas tidak mau tahu dan tidak bertanggung jawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan Program Desa berdering”

Ketika ditanya apa alasan Bapak Mega berkata seperti itu, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Seperti diketahui, bahwa sebagian besar desa di wilayah Kabupaten Mamuju ini termasuk desa tertinggal, sehingga apabila tahu kalau ada desa atau kelurahan lain yang mendapat bantuan, para kepala desa atau lurah akan datang kepada kami untuk memprotes atau menuntut kenapa desa atau kelurahannya tidak mendapat bantuan. Kalau kami sebagai penguasa di daerah diajak bicara dan melakukan kordinasi, kami dapat menjelaskan kepada para kepala desa atau lurah kriteria desa yang mendapat bantuan, sehingga

mereka paham mengapa mereka tidak mendapat bantuan. Tetapi kalau kami tidak diajak bicara, kami tidak bisa memberi penjelasan kepada kepala desa atau lurah yang datang kemari”

Pada saat ditanya, apakah ada kepala desa atau lurah yang menanyakan masalah tersebut (Program Desa berdering), dijawab banyak kepala desa yang mempertanyakan apa kriteria suatu desa mendapat bantuan tersebut dan mengapa desanya tidak mendapat bantuan meskipun masuk dalam kriteria tersebut. Secara tegas beliau menjelaskan bahwa semua ini yang menentukan pusat. Pada kunjungan pertama, tujuan penulis selain minta ijin untuk melakukan penelitian di Desa Karampuang Kecamatan Mamuju, Bapak Mega tidak mengetahui kalau pelaksanaan Program Desa Berdering di Desa Karampuang ini gagal. Pada kunjungan kedua, penulis mengatakan bahwa ternyata telepon umum yang seharusnya sudah terpasang pada akhir tahun 2010 sampai sekarang belum terpasang, barulah Bapak Mega kaget, sebab sampai sekarang tidak ada keluhan dari kepala desa terkait dengan gagalnya pemasangan telepon umum. Menurut beliau:

“Wah, saya tidak tahu kalau di Desa karampuang Program desa Berdering mengalami kegagalan. Ini berarti untuk wilayah Kabupaten Mamuju ada dua desa yang gagal, selain Desa Karampuang di Kecamatan Mamuju, adalah satu desa di Kecamatan Tapalang Barat, tetapi saya lupa desanya, apakah Desa Labuang Rano atau Desa Lebani. Untuk Kecamatan tapalang Barat terdapat tiga desa yang mendapat bantuan, yakni: Labuang rano, Lebani dan Tanete Pao. Tetapi kepala desa dari Kecamatan Tapang barat telah melapor kepada kami tentang kegagalan program tersebut dan menuntut kami untuk melanjutkan. Saya jawab bahwa program itu berasal dari pusat sedang daerah tidak tahu apa-apa, sehingga saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selain tidak ada anggaran, kami takut disalahkan oleh pusat. Dan sekarang kami tahu bahwa sudah ada dua desa yang gagal dalam Program Desa berdering”

Sebagai aparat di daerah, beliau merasa tersinggung sebab tidak ada satu suratpun yang ditujukan kepada dinas terkait di daerah. Walaupun dinas mendapat, surat itu hanyalah pemberitahuan saja, sehingga hubungan antara pelaksana dengan pemerintah daerah lepas sama sekali, dan sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah tidak dapat mengawasi pelaksanaan proyek yang ada di wilayahnya disebabkan proyek tersebut dananya bukan dari APBD.

Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan, ada dua hal yang dibahas dalam penelitian ini, yakni masalah lemahnya kordinasi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Lemahnya kordinasi : Pada bagian lain telah dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan USO tersebut, pihak ketiga atau kontraktor pemenang tender dari BP3TI langsung berhubungan dengan kepada desa Karangpuang, tanpa melakukan kordinasi dengan aparat pemerintah di atasnya. Sebagai pihak swasta, apa yang dilakukan tersebut bisa dikatakan sah-sah saja sebab prinsipnya adalah berhubungan dengan birokrasi seminim mungkin dengan tujuan memangkas anggaran. Berdasarkan pengakuan Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju, tidak ada satu suratpun yang dialamatkan kepada instansi tersebut dan memberi tugas untuk mengawasi proyek tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Menurut mereka hal ini sangat diperlukan sebab sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat cenderung mendatangkan masalah. Surat yang ditujukan kepada aparat pemerintah penerima program, yakni kepala desa seakan akan mengabaikan keberadaan aparat pemerintah yang berada di tengah, yakni Dinas Provinsi dan Dinas KKBupaten/ kota pada masing masing daerah, sehingga apabila timbul masalah, mereka dapat memberikan solusi terbaik.

Kasihani sekali Menteri Komunikasi dan Informatika yang dengan bangga menyatakan Program Desa Berdering sudah dilaksanakan sesuai dengan target, tetapi kenyataan di lapangan banyak yang mengalami kegalan. Hal ini telah dijelaskan ternyata banyak proyek Desa Berdering yang tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna jasa komunikasi tersebut. Munculnya permasalahan ini ternyata menjadikan instansi yang terkait saling melemparkan tanggung jawab, sehingga tidak ada solusi yang kongkrit agar masyarakat desa yang menerima program tersebut bangga menerima bantuan dari pemerintah. Pada tataran filosofi dan ideology program tersebut sangat baik dan muliya, karena bertujuan untuk memasyarakatkan akses informasi. Tetapi realitasnya sangat berbeda jauh dengan tujuan yang disasar.

Secara makro hal tersebut merupakan dampak, dari kurang baiknya sistem yang digunakan dalam sebuah organisasi. BP3TI yang diberikan kewenangan untuk menjadi BLU penuh pengelola USO ternyata tidak didukung dengan tata kelola organisasi, dan sistem yang cukup memadai. Besaran financial yang dikelola untuk membiayai program USO, tidak menjamin kualitas layanan yang dilaksanakan ketika sistem tata kelola, dan SDM organisasi kurang berdaya

memberikan dukungan, baik secara eksternal maupun internal. Implikasinya masyarakat yang menjadi taruannya. Hal inilah yang menjadikan partisipasi masyarakat kurang merespon program bantuan USO di berbagai daerah khususnya di desa Karampuang Mamuju.

Rendahnya partisipasi masyarakat : Sesuai dengan kerangka pemikiran, rendahnya partisipasi masyarakat sedikit banyak ditentukan karena perbedaan sudut pandang tentang kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat dengan pandangan dari pemerintah untuk memutuskan suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat desa. Kenyataan di lapangan, meskipun Desa Karampuang letaknya terpencil, tetapi dari segi telekomunikasi, penduduk desa tidak mengalami kendala. Yang sangat dibutuhkan oleh penduduk desa adalah listrik dari PLN, guna menghidupkan suasana desa. Program Desa berdering tersebut teknologinya berada dibelakang dari teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berkomunikasi saat ini. Sebagian besar masyarakat sudah menggunakan hp atau telepon *mobile*, sedang telepon umum bersifat statis. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa partisipasi masyarakat Desa karampuang begitu rendah.

Mc Luhan dalam bukunya Richard West yang berjudul Pengantar Teori komunikasi, (Richard West dan Lynn H, Turner, 2007) menyatakan bahwa medium adalah pesan (*medium is the message*) Pernyataan tersebut diungkap Mc Luhan pada tahun 1964, dan pada tahun 1967, Mc Luhan dan Fiore mengklaim bahwa selain medium merupakan pesan (*medium is the message*), medium juga merupakan "massage". Dengan mengubah satu huruf, mereka dengan kreatif memberikan pandangan baru mengenai media. Mc Luhan menyatakan bahwa kita tidak hanya dipengaruhi oleh media, tetapi kita dapat tergoda karenanya. Dari uraian diatas, muncul kesan bahwa media lebih menampakkan sebagai gaya hidup dibanding dengan kegunaan dari media tersebut.

Apabila pernyataan dari Mc Luhan tentang Teori Media ini dikaitkan dengan partisipasi Penduduk Desa Karampuang terhadap pelaksanaan Program Desa Berdering yang rendah, maka dapat dibenarkan. Masyarakat beranggapan pada era sekarang ini, media (telepon) yang digunakan adalah yang bersifat bergerak (*mobile*) sehingga dapat digunakan kapan saja, dimana saja. Sedang penggunaan media (telepon) yang statis (*fixed*) mulai ditinggalkan, sebab untuk menggunakan seseorang harus pergi ketempat dimana telepon itu berada. Perbedaan teknologi tersebut menyebabkan penduduk Desa Karampuang partisipasinya rendah, karena tidak merasa diuntungkan dengan adanya program tersebut.

PENUTUP

Karena merasa sesuai dengan tupoksinya, Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan bekerja sendiri tanpa melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah sehingga dimungkinkan tidak dapat mengawasi seluruh program yang diembannya. Disisi lain, pemerintah daerah “merasa kecolongan” karena ada program yang masuk ke wilayahnya tanpa melakukan kordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Lemah atau tidak adanya kordinasi ini menyebabkan pemerintah daerah tidak mampu berbuat apa terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini terbukti dengan adanya protes dari beberapa kepala desa terkait dengan tidak dipilihnya desanya sebagai penerima program bantuan. Selain itu juga tidak dapat berbuat apa-apa manakala program yang dilaksanakan tersebut mengalami kegagalan seperti yang terjadi di Desa karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten mamuju ini.

Karena pemilihan desa tidak melalui masukan dari daerah, maka desa yang terpilih menerima bantuan seringkali tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kominfo tersebut kurang atau tidak tepat, karena meskipun di desa itu belum masuk jaringan telepon dari PT. Telkom, tetapi sebagian besar penduduk sudah menggunakan hp untuk berkomunikasi. Karena bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keinginan penduduk desa, maka partisipasi mereka rendah. Mereka tidak menuntut kepada pemerintah meskipun proyek yang ada di desanya mengalami kegagalan, sebab tanpa adanya telepon umum yang dipasang pemerintah, mereka sudah dapat melakukan komunikasi sendiri.

Saran

Ada baiknya pemerintah pusat melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mendapat tugas untuk mengawasi serta mencari solusi terbaik apabila program tersebut menghadapi hambatan atau rintangan. Perlu dilakukan survei lapangan terlebih dahulu, atau kalau sudah ada kordinasi akan lebih mudah apabila pemerintah daerah mengusulkan desa mana saja yang dapat menerima bantuan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- Blake, Reed H. Dan Edwin O. Haroldsen. 2005 *A. Taxonomy of Concepts in Communication* (Taksonomi Konsep Komunikasi). Surabaya: Papyrus Surabaya.
- Chaplin, J.P. 2006. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: P,T, Raya Grafindo Persada.
- Hamad, Ibnu.2007. *Perkembangan Metode Penelitian Kualitatif*. Makalah disampaikan pada “Temu ilmiah Peneliti Badan Litbang SDM Depkominfo”, Bogor 22 nopember 2007
- Hamijoyo, Santoso S. 2005. *Komunikasi Partisipatoris*. Bandung: Humaniora.
- Littlejohn, Stephen W. And karen A. Foss. (2008). *Theories of Human Communication* (Teori Komunikasi). Jakarta: Salemba Humanika.
- Mulyana,Deddy. 2003 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2007. *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* (Pengantar Teori Komunikasi, Analisis dan Aplikasi). Jakarta: Salemba Humanika.